

**STUDI KELEMBAGAAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
HUTAN MANGROVE DI DESA MUNTE  
KECAMATAN BONE-BONE  
(Kajian *Base Line* Kelembagaan Untuk Program *Adaptasi Terhadap  
Perubahan Iklim Global*)**

Society Local Institute Study in Mangrove Forest Development  
at Desa Munte Kecamatan Bone-Bone  
(Institute *Base Line* Study for *Adaptation of Global Climate Changes* Program)

**Kaimuddin**

Agriculture Climatology Laboratory, Faculty of Agriculture, Hasanuddin  
University E-mail: kaimuddin@yahoo.com

**ABSTRACT**

This research aims to detect local institute form society and agreement connection delivers institution in forest development mangrove at Desa Munte on adaptation of global climate changes.

This research result can be motivation media for society to always increase capacity aim local institute reinforcement, related to keikutsertaan in managed forest mangrove, with upon which information for wisdom authority holder in forest development mangrove. besides, also be of benefit to researcher group or other party that want to do furthermore watchfulness.

**Keyword:** *Institute Local, mangrove, adaptation, global climate*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Dahuri, 2004) yang kaya dan beragam sumberdaya alam untuk dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai sumber kehidupan. Keanekaragaman sumberdaya alam tersebut meliputi sumberdaya yang dapat pulih maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih. Sebagian besar sumberdaya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Namun Indonesia termasuk peringkat 4

penghasil gas rumah kaca dan 19 milyar ton karbon tersimpan dalam hutan (termasuk mangrove). Juga termasuk negara kepulauan dengan potensi signifikan terkena dampak perubahan iklim

Fakta lain menunjukkan adanya peningkatan kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk (yang diperkirakan mencapai 225 juta jiwa pada tahun 2010) serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumberdaya ekosistem pesisir menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan ekonomi nasional di masa mendatang. Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir termasuk prioritas utama untuk pusat

pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Alasan tersebut mendorong sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

Peran strategis dan prospek yang cerah dari ekosistem pesisir beserta sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya sangat jelas dalam menunjang pembangunan nasional, namun di balik peran tersebut terdapat kendala dan kecenderungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (*sustainable capacity*). Berbagai kasus seperti pencemaran perairan, degradasi fisik habitat pesisir, abrasi pantai, merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

Kabupaten Luwu Utara memiliki daerah pesisir atau sempadan pantai yang tepatnya berada di Teluk Bone atau Pantai Timur Sulawesi yang diapit oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Wilayah pesisir Luwu Utara sebelumnya merupakan habitat bakau dari jenis *Rhizophora* dan *Avicennia*. Habitat bakau tersebut telah mengalami degradasi akibat terjadinya pembuatan empang secara besar-besaran menyebabkan pantai makin menyusut ke daratan.

Dampak yang timbul akibat rusaknya kelestarian hutan bakau tersebut antara lain; berlangsungnya abrasi pantai sepanjang tahun sehingga pemukiman dan lahan pertanian masyarakat semakin terancam, daya dukung kelestarian lingkungan pesisir pantai semakin menurun, dan tingkat produktivitas lahan wilayah pesisir semakin menurun seperti berkurangnya

penyediaan nener, benur, kerang-kerangan, ikan, kepiting, dan biota lain, serta penyangga angin, udara, tempat penelitian, perlindungan berbagai satwa liar, rekreasi, dan penyangga ombak.

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumberdaya pesisir termasuk hutan mangrove tidak optimal dan tidak berkelanjutan namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang kurang mantap. Kondisi tersebut sangat terkait dengan sumberdaya manusia yang ada sebagai pelaku dan pengguna sumberdaya alam serta kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan mangrove.

Pada tahun 1999, paradigma baru pembangunan kehutanan yang telah memberikan penekanan pada "*Community Based Development*" yaitu pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat yang berdomisilidi dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dalam hal ini perlu ada penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove, karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat sehingga benar-benar mempercepat divusi dan adaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam pengembangan hutan mangrove. Dengan demikian penataan sistem kelembagaan dengan tepat akan memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pembangunan kehutanan pada saat ini lebih banyak mengakomodir keinginan yang berkembang dari bawah (*Bottom Up Planning*), namun implementasinya kebijakan tersebut masih diakomodir keinginan dari atas (*Top Down*

*Planning*), sehingga kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan belum berfungsi dengan baik. Oleh karena dianggap perlu dilakukan suatu penelitian mengenai Studi Kelembagaan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Mangrove, yang berlokasi di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan dan telah diprogramkan untuk dikembangkan seluas 320 ha dan telah berjalan seluas 100 ha. Pada lokasi tersebut juga telah terbentuk beberapa lembaga masyarakat lokal berupa Kelompok Peduli Abrasi Pantai dan Kelompok Penanaman Mangrove yang sangat potensial untuk dibina dalam upaya pengembangan hutan mangrove secara optimal dan berkelanjutan.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui:

1. Wujud kelembagaan lokal masyarakat dalam pembangunan hutan mangrove di lokasi penelitian.
2. Kesadaran masyarakat terutama dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan dan kegiatan-kegiatan pembangunan hutan mangrove secara kelembagaan.
3. Hubungan kerjasama antar lembaga masyarakat dalam pembangunan hutan mangrove.
4. Perspektif kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan hutan mangrove.
5. Aturan-aturan yang terbentuk pada lokasi pembangunan hutan mangrove.

## METODE PENELITIAN

### A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena termasuk salah satu wilayah hutan mangrove yang mendapat prioritas penanganan di Kabupaten Luwu Utara yang telah diprogram seluas 320 ha dan telah berjalan sekitar 100 ha. Pada lokasi ini pula telah terbentuk beberapa organisasi-organisasi lokal masyarakat yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan April sampai Juni 2007.

### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi: Luas hutan mangrove, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, lembaga lokal, dan sarana prasarana lainnya. Data sekunder tersebut bersumber dari beberapa literatur yang dikumpulkan dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, BPS, dan lain-lain.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sebagai sasaran penelitian (sumber data) dengan menggunakan lembar pertanyaan atau kuisioner dan tape record. Data yang dikumpulkan melalui wawancara terdiri dari: Pembentukan Organisasi, Kesadaran berorganisasi, Kemampuan Pengelolaan organisasi, Rincian sumberdaya dan akses terhadap sumberdaya, Norma dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, dan Hubungan internal dan eksternal organisasi.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini, khususnya data primer dilakukan dengan teknik sampling karena tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada pada lokasi penelitian. Teknik sampling yang dipilih adalah "*Simple Random Sampling*" dengan pertimbangan semua anggota populasi memberikan pengaruh yang sama terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun jumlah sampel yang ditetapkan, mengacu pada Tabel Krejci, dengan tingkat kesalahan 5% atau kepercayaan 95% terhadap populasi. Jumlah populasi yang ada pada lokasi penelitian yaitu 516 yang didasarkan pada jumlah Rumah Tangga, sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebesar 217.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang bersumber dari persepsi responden, maka sebelum dianalisis untuk memperoleh hasil dan kesimpulan, sebelumnya dilakukan pengukuran untuk mendapatkan data kuantitatif. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*Skala Guttman*" karena diharapkan jawaban yang tegas yaitu interval "Ya" atau "Tidak" dengan skor tertinggi bernilai 1 (satu) dan terendah 0 (nol). Dengan demikian untuk jawaban "Ya" diberi skor 1, dan jawaban "Tidak" diberi skor 0. Angka tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan daftar tabulasi dengan mempertimbangkan jumlah responden dan banyaknya instrumen (Sugiyono, 1993).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kesadaran Masyarakat secara Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan Mangrove**

Kesadaran masyarakat untuk berorganisasi dalam kaitannya dengan kemudahan mengorganisir diri dalam mengelola sumberdaya yaitu hutan mangrove menunjukkan nilai yang sangat baik (90% dari kriteria yang ditetapkan) dapat dilihat pada Lampiran 2. Kesadaran ini dibuktikan dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada secara bersama-sama atau berkelompok, dan menyadari akan pentingnya aturan-aturan yang dapat dipedomani agar lebih terarah dan terorganisir. Di samping itu, masyarakat juga menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing, dan yang terpenting adalah masyarakat menyadari akan kapasitasnya dalam mengelola organisasi sehingga merasa perlu ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan (misal pelatihan budidaya tanaman mangrove), kursus-kursus, atau kegiatan lain yang sifatnya membangun.

### **B. Kemampuan Masyarakat dalam Mengelola Organisasi**

Masyarakat dalam mengelola organisasi membutuhkan suatu kapasitas sumber daya, baik dalam implementasi program, pembuatan norma, aturan, dan kepemimpinan. Pengelolaan organisasi itu sendiri memiliki aturan, pengurus, dan ciri khas sendiri sehingga pada setiap komunitas memiliki ciri yang berbeda tetapi secara substantif semua itu bertujuan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi berdasarkan norma yang telah dibuat untuk mencapai kemandirian masyarakat, sehingga mampu berbuat dan meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki secara bersama-sama.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola organisasi khususnya dalam

pengelolaan hutan mangrove berdasarkan persepsi responden menunjukkan angka 78% (Lampiran 3). Artinya, masyarakat telah memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola organisasi terkait dengan hutan mangrove. Kemampuan tersebut dibuktikan dengan keterlibatannya dalam menyusun aturan-aturan yang dianggap perlu demi kelestarian hutan mangrove. Selain itu, aturan yang akan dibuat mempertimbangkan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya, sehingga dirasa perlu untuk menyusun syarat-syarat menjadi pengurus organisasi.

Kendala yang dihadapi sehubungan dengan variabel ini, adalah keterbatasan masyarakat dalam membuat laporan kegiatan, keuangan, ataupun laporan kemajuan pekerjaan. Keterbatasan ini sangat berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah. Kemampuan mengelola organisasi hanya diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya informal. Disamping itu, masyarakat juga belum siap untuk menghadapi konflik, dan sebagai jalan keluar adalah melibatkan pemerintah sebagai pemecah persoalan.

#### **C. Rincian Sumberdaya dan Akses terhadap Sumberdaya**

Hasil analisis jawaban dari responden yang ditunjukkan pada Lampiran 4 yaitu 77% dari kriteria yang ditetapkan, menjelaskan bahwa organisasi masyarakat telah memiliki sumber daya berupa tenaga kerja, lahan (hutan mangrove), bahan dan alat, tetapi belum memiliki modal, keterampilan yang masih rendah, dan teknologi yang masih terbatas, namun tetap diupayakan ketersediaannya oleh semua anggota baik dengan cara swadaya maupun dari pemerintah. Upaya ini dimotivasi oleh keinginan

untuk memanfaatkan sumberdaya secara bersama-sama

Kendala selama ini adalah belum adanya keberanian untuk menetapkan salah satu sumberdaya sebagai sumberdaya milik bersama sehingga dalam mengakses sumberdaya tersebut tidak mengalami kesulitan. Selain belum ada keberanian, juga belum ditemukannya sumberdaya yang tepat dan layak untuk menjadi sumberdaya milik bersama.

#### **D. Norma dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya**

Kemampuan anggota organisasi dalam mengelola suatu organisasi termasuk di dalamnya bagaimana aturan yang dibuat dan digunakan. Aturan-aturan itu bisa sifatnya tertulis maupun tidak tertulis tetapi tujuannya adalah agar organisasi itu memiliki norma atau etika dalam menjalankannya. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana keterlibatan seluruh anggota dalam proses penyusunannya, serta penggunaannya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian diperoleh nilai 46% dari kriteria yang ditetapkan (Lampiran 5). Hal tersebut menerangkan bahwa norma dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya belum berjalan optimal. Lebih detil dijelaskan belum ditemukannya aturan yang dapat dipedomani dalam pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove sebagai salah satu indikator keberhasilan. Dan belum disepakati adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar aturan baik aturan organisasi secara umum maupun aturan dalam bagi hasil sumberdaya.

#### **E. Hubungan Internal dan Eksternal Lembaga Masyarakat**

Organisasi masyarakat baik aksi kolektif, organisasi sosial, dan organisasi pembangunan memiliki hubungan internal, dimana hubungan antara anggota sangat kuat karena mereka lahir dari sebuah kondisi yang sama, sehingga ikatan emosional dan sosial mereka sangat kuat. Hubungan ini ditunjukkan dengan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama anggota masyarakat. Sedangkan hubungan eksternal juga sangat diharapkan terutama bantuan dari pemerintah baik materil maupun non materil. Kedua hubungan ini baik internal maupun eksternal dapat dilihat pada saat ada masalah. Masalah tersebut diselesaikan secara bersama-sama anggota kelompok, dan apabila belum ditemukan solusi, meminta bantuan luar dalam hal ini pemerintah untuk turut membantu mencari jalan keluar.

Dan dari hasil analisis jawaban responden tentang persepsi mengenai hubungan internal dan eksternal masyarakat atau lembaga masyarakat menunjukkan nilai 77% dari kriteria yang ditetapkan (Lampiran 6), artinya, hubungan internal dan eksternal lembaga masyarakat pada lokasi penelitian termasuk baik. Hubungan yang baik ini didasari oleh kesamaan dari aspek geografis, dimana dari total luas wilayah Desa Munte (11,61 km<sup>2</sup>) (Kecamatan Bone-Bone dalam Angka, 2007), adalah wilayah pantai yang secara otomatis akan sangat mempengaruhi kultur masyarakat, pola hidup, dan jenis mata pencaharian atau sumber kehidupan yang cenderung sama.

Hubungan eksternal lembaga dapat dilihat pada beberapa program pemerintah yang dikerjakannya dengan masyarakat misal penghijauan pantai, penanaman mangrove termasuk pembibitan tumbuhan mangrove. Selain bantuan fisik, juga masyarakat sangat terbuka dengan kehadiran pihak luar

atau pemerintah dalam hal pembinaan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan tentang pengelolaan hutan mangrove, dan penyuluhan tentang bagaimana mengelola organisasi masyarakat terkait dengan peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya alam, serta pembinaan sosial yaitu bagaimana menyikapi persoalan-persoalan (konflik) baik horizontal maupun vertikal).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis persepsi responden tentang studi kelembagaan dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone yang dilaksanakan selama 3 bulan, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kehadiran lembaga masyarakat dalam mengelola hutan mangrove sangat berarti dalam adaptasi terhadap perubahan iklim global.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga lokal cukup baik meskipun masih banyak keterbatasan dalam sistem pengelolaan.
3. Masyarakat cukup memiliki kemampuan pada bidang-bidang tertentu dalam mengelola organisasi kecuali pada bagian penyusunan norma atau aturan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya.
4. Lembaga masyarakat yang telah dibentuk pada umumnya belum memiliki aturan secara tertulis.
5. Lembaga masyarakat pada dasarnya memiliki sumberdaya berupa lahan dan tenaga kerja, tetapi masih minim dari aspek modal, keterampilan, dan teknologi, serta norma yang

mengatur pemanfaatan sumberdaya.

6. Hubungan yang terbina antara masyarakat sesama anggota dan antar lembaga cukup baik.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas ditemukan beberapa kendala sehingga dianggap perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Adanya keterbatasan yang dimiliki masyarakat dalam menyusun norma atau aturan dalam mengelola organisasi dan sumberdaya, maka diharapkan bantuan kepada semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut (melakukan pembinaan).
2. Penguatan kapasitas dan pengurangan kerentanan harus dilakukan terhadap system alami (habitat) dan sistim manusia (perencanaan pembangunan dan kehidupan sosial ekonomi).
3. Bantuan pihak luar khususnya pemerintah dalam hal permodalan, peningkatan keterampilan, input teknologi, sangat diharapkan.
4. Untuk pengembangan organisasi/lembaga masyarakat khususnya lembaga yang konsent terhadap hutan mangrove, sebaiknya membuat aturan yang tertulis untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.
5. Peran aktif seluruh anggota masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove masih perlu ditingkatkan.
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dapat dicapai melalui

proses pendampingan secara terpadu oleh berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2003. Participatory Local Social Development. Modul Analisis Kebutuhan, analisis fungsional, dan Perencanaan Partisipatoris, Makassar.
- Anonimous, 2005, Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Pantai Kecamatan Malangke dan Bone-Bone, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Masamba.
- Anonimous, 2007. Pembentukan Kelompok Peduli Abrasi Pantai dan Kelompok Penanaman Mangrove Teluk Bone, Desa Munte Kecamatan Bone-Bone Luwu Utara, Masamba.
- BPS dan BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara, 2007. Kecamatan Bone-Bone dalam Angka. Masamba.
- Dahuri, R., 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nontji, A., 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Odum, 1976. Ecological Guidelines for Tropical coastal Development. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Margos.
- Snedaker, S.C., 1987. Mangrove: Their Value and Perpetuation. UNESCO, Paris.
- Sugiyono, 1993. Metode Penelitian Administrasi. Penerbit Alfabeta. Bandung